

**ANALISIS DAMPAK AKREDITASI SEKOLAH DALAM
PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Kasus Di SD Negeri Donohudan 3 Kecamatan
Ngemplak Kabupaten Boyolali)**

TESIS



Diajukan Kepada
Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Magister Manajemen Pendidikan

Oleh :

SRIHANI

NIM : Q.100040123
Program Studi : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Manajemen Sistem Pendidikan

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Rendahnya mutu pendidikan disinyalir sebagian besar diakibatkan oleh rendahnya sumber daya manusia. Menurut hasil studi Bank Dunia tahun 2000 yang telah disarikan Sukmadinata, dkk. (2002 : 7), kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh empat faktor utama, yaitu (1) *innovation and creativity* (45%), (2) *net working* (25%), (3) *technology* (20%), dan (4) *natural resources* (10%). Tiga faktor pertama menempatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai faktor yang strategis. Artinya, ke depan dalam globalisasi ekonomi dan teknologi informasi, tuntutan dan kebutuhan utama pengembangan SDM yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan inovasi dan kreatifitas, membangun jaringan kerjasama, mengembangkan dan mendayagunakan teknologi, dan mengelola serta mengembangkan sumber daya yang dimiliki.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia, dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya penguasaan dan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain manfaat bagi kehidupan manusia, di satu sisi perubahan tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka sebagai bangsa kita perlu terus

mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui pengembangan dan perbaikan kurikulum dan sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan pengadaan materi ajar, pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, serta peningkatan mutu manajemen sekolah.

Pendidikan yang berkualitas dapat menunjuk kepada kualitas proses dan kualitas produk. Pendidikan disebut bermutu dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, peserta didik mengalami proses pembelajaran yang bermakna, dan ditunjang oleh sumber daya (manusia, dana, sarana, prasarana) yang wajar. Tentu saja hal ini juga dipengaruhi oleh kualitas masukannya. Logikanya, proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Hasil suatu pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu atau lebih dari ciri-ciri berikut ini : 1) peserta didik menunjukkan tingkat penguasaan

yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang harus dikuasainya sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya adalah hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar, 2) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupannya, sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu melainkan dapat melakukan sesuatu yang fungsional untuk kehidupannya (*learning and earning*), 3) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Dari segi ini maka relevansi merupakan salah satu aspek atau indikator dari kualitas.

Ada beberapa indikator yang dapat menggambarkan situasi pendidikan di Indonesia saat ini, salah satunya adalah indikator mutu pendidikan. Indikator yang berkaitan dengan mutu pendidikan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu : 1) indikator yang berkaitan dengan input, yaitu indikator yang menunjukkan mutu masukan seperti siswa baru tingkat I, 2) indikator yang berkaitan dengan proses, seperti proses belajar mengajar dan besarnya angka kehadiran siswa, dan 3) indikator yang berkaitan dengan output, seperti angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan. (Balitbang Depdiknas, 2003:102).

Usaha untuk terus meningkatkan mutu pendidikan tidak pernah berhenti dilakukan, dan berbagai terobosan baru terus diperkenalkan dan dilakukan oleh pemerintah melalui Depdiknas antara lain dalam bidang pengelolaan sekolah, peningkatan sumber daya tenaga kependidikan, pengembangan materi ajar dan sebagainya. Sementara itu terobosan yang dilakukan dalam upaya peningkatan sumber daya tenaga kependidikan adalah melalui pelatihan terintegrasi bagi guru, kepala sekolah dan staf

dinas yang didasarkan kepada kompetensi yang harus mereka miliki. Untuk keperluan pelatihan terintegrasi tersebut salah satu materi dasar adalah tentang akreditasi. Hal ini dilaksanakan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mencapai pendidikan yang bermutu dengan cara memberikan penilaian terhadap sekolah .

Sebenarnya akreditasi sudah dikenal banyak orang. Akreditasi yang dilakukan Badan Akreditasi Nasional (BAN) memberikan pengakuan pada kelayakan suatu perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dalam memberikan pelayanan pendidikan. Sedangkan untuk tingkat sekolah, akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah (BAS) yang sekarang ini sedang dilaksanakan tidak hanya di sekolah swasta tetapi juga di sekolah-sekolah negeri. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 menuntut adanya perubahan manajemen pendidikan dari sentralistik ke desentralistik. Ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan yang dahulu terpusat sekarang bergeser ke unit-unit kelembagaan pendidikan yang makin kecil di tingkat pemerintah daerah sampai tingkat komunitas sekolah. Dengan pergeseran ini berarti bahwa proses pengambilan keputusan pendidikan diharapkan menjadi lebih terbuka, dinamik, dan demokratis. Hal ini membawa implikasi bahwa peran serta orang tua, peserta didik, masyarakat dan guru menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan.

Pelaksanaan otonomi pendidikan juga menuntut perubahan dalam sistem supervisi yang bukan saja mengemban fungsi pengawasan tetapi juga fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pengawasan dan pembinaan pendidikan baik di tingkat lembaga pendidikan maupun birokrasi pengelolaan. Pengawasan dan pembinaan sebagai bagian dari

manajemen harus dapat berjalan seimbang dengan manajemen lainnya agar dapat dicapai peningkatan kinerja penyelenggara pendidikan secara optimal. Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai implikasi terhadap tuntutan pelaksanaan proses evaluasi yang lebih profesional, obyektif, jujur dan transparan sebagai rangkaian dari pengawasan dan pembinaan sekolah dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

Proses evaluasi terhadap seluruh aspek pendidikan harus diarahkan pada upaya untuk menjamin terselenggaranya layanan pendidikan yang berkualitas (*Quality assurance*) dan memberdayakan mereka yang dievaluasi sehingga menghasilkan lulusan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Artinya pihak yang dievaluasi, apakah itu administrator pendidikan, Kepala Sekolah, guru, atau siswa akan merasakan bahwa kegiatan evaluasi membantu untuk mengenal berbagai kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan arah yang jelas dilakukan untuk mencapai kualitas yang lebih baik. Oleh karena itu evaluasi harus dilakukan secara berkesinambungan, komprehensif, dan transparan serta memotivasi peserta didik dan pengelola pendidikan untuk terus menerus berupaya meningkatkan mutu kegiatan pembelajaran dan pendidikan.

Sehubungan dengan prinsip evaluasi di atas, untuk menjaga komparabilitas dan pengakuan kualitas input, proses dan hasil dari setiap lembaga pendidikan perlu dilakukan akreditasi yang merupakan kegiatan evaluasi yang bersifat eksternal oleh suatu institusi akreditasi yang independen dan berwenang untuk itu. Untuk mencakup aspek input, proses dan hasil, maka instrument akreditasi akan dikembangkan dengan menggunakan model *Context-Input-Process-Product (CIPP)* yang pertama

kali dikembangkan oleh Stufflebeam (Herod, 2000).

Proses akreditasi tersebut harus dilakukan secara berkala dan terbuka dengan tujuan membantu dan memberdayakan lembaga pendidikan agar mampu mengembangkan sumber daya-nya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Proses akreditasi dimulai dengan; *pertama*, pelaksanaan evaluasi diri oleh sekolah, yaitu dengan cara sekolah mengisi instrument evaluasi diri yang diperoleh dari BAS; *kedua*, pengajuan akreditasi oleh sekolah; *ketiga*, penentuan kelayakan visitasi oleh BAS; *keempat*, pelaksanaan visitasi oleh tim asesor; *kelima*, penetapan hasil akreditasi oleh BAS; *keenam*, penerbitan hasil akreditasi oleh BAS. (Depdiknas, 2004 : 43) Penilaian terhadap kualitas pendidikan secara berkala merupakan bagian yang penting dari proses akreditasi. Untuk tujuan obyektifitas, akreditasi perlu dilakukan oleh suatu institusi yang independen yang mewakili para stakeholders, seperti perwakilan asosiasi profesi, praktisi pendidikan, dan masyarakat pengguna lulusan.

Rasional mengapa akreditasi sekolah diperlukan memiliki makna untuk mendorong dan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan sekolah kaitannya dengan kebutuhan untuk mencapai keunggulan yang lebih baik, relevan, dan efektifitas. Disamping itu juga merupakan suatu cara untuk memotivasi sekolah dalam rangka mencapai standar yang diinginkan, bahkan dimungkinkan melakukan yang lebih baik atau melampaui standar itu. Dengan demikian akreditasi memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa sekolah sedang melaksanakan program dengan kualitas yang dapat diterima oleh masyarakat, dan menggunakan dana yang ada dengan sepantasnya.

Beragamnya kondisi lingkungan sekolah dan bervariasinya kebutuhan siswa di dalam proses pembelajaran, ditambah lagi dengan kondisi geografi Indonesia yang sangat kompleks seringkali tidak dapat diapresiasi secara lengkap oleh birokrat pusat. Hal inilah yang menjadi kesenjangan dalam pelaksanaan akreditasi di setiap sekolah. Akreditasi sekolah harus diletakkan dalam konteks peningkatan mutu pendidikan dan otonomi sekolah. Oleh karena itu di dalam proses peningkatan mutu pendidikan perlu dicari alternatif pengelolaan sekolah. Hal ini mendorong lahirnya konsep manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Manajemen alternatif ini memberikan kemandirian kepada sekolah untuk mengatur dirinya sendiri dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, tetapi tetap mengacu kepada kebijakan nasional. Konsekuensi dari pelaksanaan program ini adanya komitmen yang tinggi dari berbagai pihak yaitu orang tua / masyarakat, guru, kepala sekolah, siswa dan staf lainnya disatu sisi, dan pemerintah disisi lainnya sebagai partner dalam mencapai tujuan peningkatan mutu.

Dalam rangka pelaksanaan konsep manajemen ini, strategi yang dapat dilaksanakan oleh sekolah antara lain meliputi evaluasi diri (***self evaluation***) untuk menganalisa kekuatan dan kelemahan sekolah. Berdasarkan evaluasi tersebut sekolah bersama-sama orang tua dan masyarakat menentukan visi dan misi sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan atau merumuskan mutu yang diharapkan dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana program sekolah termasuk pembiayaannya dengan mengacu kepada skala prioritas dan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi sekolah dan sumber daya yang tersedia. Dalam penyusunan

program, sekolah harus menetapkan indikator atau target mutu yang akan dicapai, kemudian melakukan monitoring dan evaluasi program yang telah direncanakan sesuai dengan pendanaannya untuk melihat ketercapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan nasional dan target mutu yang dicapai serta melaporkan hasilnya kepada masyarakat dan pemerintah. Hasil evaluasi (proses dan output) ini selanjutnya dapat dipergunakan sebagai masukan untuk perencanaan/ penyusunan program sekolah di masa mendatang.

Berbagai latar belakang masalah diatas, dan untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana proses akreditasi yang dilaksanakan di sekolah-sekolah serta dampaknya dalam peningkatan mutu pendidikan utamanya di tingkat sekolah dasar, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian di SD Negeri Donohudan 3 Kecamatan Ngemplak Boyolali, karena SD tersebut telah di akreditasi pada tahun 2003.

Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses akreditasi sekolah dilaksanakan di SD Negeri Donohudan 3 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.
2. Bagaimana dampak akreditasi tersebut dalam peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Donohudan 3 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah :

Untuk mendiskripsikan proses akreditasi yang dilaksanakan di SD Negeri Donohudan 3 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Untuk mendiskripsikan dampak akreditasi kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan di SD Negeri Donohudan 3 Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah bahan kajian, khususnya pada Sekolah Dasar Negeri Donohudan 3 Ngemplak Boyolali dan pada umumnya semua Sekolah Dasar.

Memberikan sumbangan wawasan bagi penelitian selanjutnya pada Program Pascasarjana Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menerapkan teori dan mendapatkan gambaran dan pengalaman praktis dalam penelitian survey mengenai manajemen

pendidikan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menganalisa dampak akreditasi dalam peningkatan mutu pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Donohudan 3 Ngeemplak Boyolali khususnya, dan Sekolah Dasar pada umumnya.
- b. Sebagai gambaran bagi Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Boyolali dalam upaya pelaksanaan akreditasi di sekolah-sekolah.